



Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh Tahun 2023–2024

Analysis of Regional Financial Ratios in Assessing the Financial Performance of the Governments of Solok City, Padang City, and Payakumbuh City, 2023–2024

Siska Yulia Defitri^{1*}, Elsa Febri Almina², Aulia Nanda Putri³, Disa Fide Kasoa⁴, Chintia Devina Hamdi⁵, Lili Wahyuni⁶

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email: siskayd023@gmail.com^{1*}, elsafebrialmina@gmail.com², aulianandaputri788@gmail.com³, disafidekasoa7@gmail.com⁴, chintiadevina09@gmail.com⁵, wahyunilili011978@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 15-07-2026

Revised : 17-07-2026

Accepted : 19-07-2026

Published : 21-07-2026

Regional financial performance is an important indicator for assessing the ability of local governments to manage financial resources effectively, efficiently, transparently, and accountably. This assessment can be conducted through financial ratio analysis based on the Budget Realization Report (Laporan Realisasi Anggaran/LRA), which provides an overview of regional financial conditions and supports policy decision-making. This study aims to analyze and compare the financial performance of the Governments of Solok City, Padang City, and Payakumbuh City for the 2023–2024 fiscal years using the financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, expenditure harmony ratio, and growth ratio. This study employed a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports published by the Audit Board of the Republic of Indonesia and the respective local governments. The results indicate that each local government demonstrates different levels of financial performance across the measured ratios, reflecting differences in their ability to manage regional revenues and expenditures. These findings suggest that regional financial performance is influenced by the capacity of local governments to optimize revenue generation and allocate expenditures effectively and efficiently. Therefore, financial ratio analysis can serve as an evaluation tool for assessing local government financial performance and as a basis for improving the quality of regional financial management in the future.

Keywords: *Regional Financial Performance; Financial Ratio Analysis; Local Government.*

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023–2024 menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan pemerintah daerah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah memiliki tingkat kinerja keuangan yang berbeda pada setiap rasio, yang mencerminkan adanya perbedaan kemampuan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan serta mengalokasikan belanja secara



efektif dan efisien. Dengan demikian, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Analisis Rasio Keuangan; Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diberikan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Penilaian ini penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui analisis tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi penggunaan anggaran, keserasian alokasi belanja, serta pertumbuhan kondisi keuangan daerah dari waktu ke waktu.

Analisis rasio keuangan telah banyak diterapkan dalam berbagai penelitian mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio keuangan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu daerah sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil analisis rasio keuangan tidak hanya bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai penelitian terdahulu juga telah membahas analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Syalomita Gabrilia Vanesa Wawolangi, Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021–2023 melalui rasio efektivitas, efisiensi, keserasian, pertumbuhan, dan kemandirian daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Riska Wulandari, Baiq Anggun Hilendri Lestari, dan Adithya Bayu Suryantara pada Pemerintah Kota Mataram. Selain itu, Novira Sartika meneliti kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, sedangkan Heri Faisal Harahap mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tingkat kinerja keuangan yang



berbeda, yang dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola pendapatan maupun belanja daerah.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah juga telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kota Surakarta, Kota Makassar, Provinsi Jawa Tengah, serta beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menggunakan indikator rasio keuangan yang relatif sama, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja, dan pertumbuhan keuangan pada setiap daerah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti potensi ekonomi daerah, kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur belanja, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, masih terdapat peluang untuk melakukan penelitian lanjutan (*research gap*). Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu pemerintah daerah atau satu wilayah tertentu, sehingga penelitian yang membandingkan beberapa pemerintah daerah dalam periode yang sama masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2023–2024 juga masih jarang ditemukan. Padahal, ketiga kota tersebut memiliki karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, serta kemampuan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi alasan yang menarik untuk dilakukan analisis perbandingan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023–2024 berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada penyajian gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah selama periode penelitian.



Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kota Payakumbuh. Laporan tersebut digunakan sebagai sumber data karena memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diperlukan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Pemilihan sampel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi data utama dalam perhitungan rasio keuangan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan ketiga pemerintah daerah selama periode penelitian.

Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penggunaan teknik ini bertujuan agar sampel yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara optimal.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dipublikasikan secara resmi melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau situs resmi pemerintah daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat data yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menghitung rasio keuangan daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023–2024 yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta pemerintah daerah terkait. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan teori sekaligus untuk mendukung proses analisis dan pembahasan hasil penelitian.



Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri atas lima indikator sebagai berikut.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan.
3. Rasio Pertumbuhan, untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, maupun Pendapatan Asli Daerah dari satu periode ke periode berikutnya.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis rasio keuangan daerah. Data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diolah dan dianalisis dengan menghitung setiap rasio keuangan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan kriteria penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan masing-masing daerah.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023–2024 sebagai sumber data penelitian.
2. Mengidentifikasi data dan komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran yang diperlukan untuk menghitung masing-masing rasio keuangan daerah.
3. Menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan pada setiap pemerintah daerah.
4. Membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan antar pemerintah daerah serta antarperiode penelitian untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kondisi kinerja keuangan masing-masing daerah.
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan menggunakan tiga rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan. Masing-masing rasio dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$



2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Rasio Kemandirian masing-masing kota

Daerah	2023	2024
Kota Solok	9,03%	9,16%
Kota Padang	39,95%	35,53%
Kota Payakumbuh	19,99%	22,61%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dibandingkan Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Pada tahun 2023 rasio kemandirian Kota Padang mencapai 39,95%, kemudian mengalami penurunan menjadi 35,53% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kota Padang dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih lebih baik dibandingkan dua daerah lainnya.

Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan rasio kemandirian dari 19,99% pada tahun 2023 menjadi 22,61% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer mulai berkurang.

Sementara itu, Kota Solok memiliki rasio kemandirian terendah, yaitu 9,03% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 9,16% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilainya masih tergolong rendah sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2007), ketiga daerah masih berada pada kategori rendah, terutama Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui PAD masih terbatas.

2. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2. Rasio Efektivitas masing-masing kota

Daerah	2023	2024
Kota Solok	91,66%	92,08%
Kota Padang	90,25%	93,73%
Kota Payakumbuh	105,95%	106,51%



Berdasarkan hasil penelitian, Kota Payakumbuh memiliki rasio efektivitas PAD tertinggi, yaitu sebesar 105,95% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 106,51% pada tahun 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan PAD dapat dikatakan sangat efektif.

Kota Solok memperoleh rasio efektivitas sebesar 91,66% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 92,08% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian target PAD, meskipun realisasi pendapatan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Kota Padang juga mengalami peningkatan efektivitas dari 90,25% menjadi 93,73%. Walaupun target PAD belum sepenuhnya tercapai, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam merealisasikan penerimaan PAD.

Secara keseluruhan, seluruh daerah mengalami peningkatan efektivitas PAD pada tahun 2024. Namun, hanya Kota Payakumbuh yang mampu merealisasikan PAD melebihi target sehingga memperoleh kategori sangat efektif, sedangkan Kota Solok dan Kota Padang berada pada kategori efektif.

3. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan masing-masing kota

Daerah	2023	2024
Kota Solok	8,74%	5,24%
Kota Padang	7,49%	0,58%
Kota Payakumbuh	-2,95%	12,53%

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Solok mengalami pertumbuhan PAD sebesar 8,74% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan tersebut menurun menjadi 5,24%. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan PAD masih menunjukkan nilai positif sehingga penerimaan PAD tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota Padang juga mengalami penurunan tingkat pertumbuhan PAD. Pada tahun 2023 pertumbuhan PAD mencapai 7,49%, sedangkan pada tahun 2024 hanya sebesar 0,58%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD masih terjadi, tetapi laju pertumbuhannya sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbeda dengan dua daerah lainnya, Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,95% pada tahun 2023. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Namun, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 12,53%, yang merupakan nilai pertumbuhan tertinggi di antara ketiga daerah. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.



Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD di ketiga daerah menunjukkan dinamika yang berbeda. Kota Solok mengalami perlambatan pertumbuhan, Kota Padang mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan pada tahun 2024, sedangkan Kota Payakumbuh berhasil bangkit dari pertumbuhan negatif menjadi pertumbuhan positif yang cukup tinggi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pemerintah daerah memiliki karakteristik kinerja keuangan yang berbeda. Dari aspek kemandirian keuangan, Kota Padang memiliki tingkat kemandirian paling tinggi, yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah relatif lebih besar dibandingkan Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Meskipun demikian, ketiga daerah masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Dari aspek efektivitas PAD, seluruh daerah menunjukkan kinerja yang baik. Kota Payakumbuh menjadi daerah dengan kinerja terbaik karena realisasi PAD mampu melampaui target pada kedua tahun penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan target PAD telah disusun secara realistis dan didukung oleh optimalisasi pemungutan PAD.

Sementara itu, berdasarkan rasio pertumbuhan PAD, Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan kinerja yang paling signifikan pada tahun 2024 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2023. Sebaliknya, Kota Solok dan Kota Padang masih mencatat pertumbuhan positif, namun mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu terus menggali potensi sumber-sumber PAD baru agar pertumbuhan pendapatan daerah dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Padang unggul dari sisi tingkat kemandirian keuangan, Kota Payakumbuh unggul dalam efektivitas dan pertumbuhan PAD pada tahun 2024, sedangkan Kota Solok menunjukkan kinerja yang relatif stabil namun masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Oleh karena itu, ketiga pemerintah daerah perlu terus meningkatkan optimalisasi sumber-sumber PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi dan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh selama periode anggaran 2023–2024 menunjukkan perbedaan pada setiap indikator yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan tersebut menggambarkan bahwa kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih bervariasi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui sekaligus membandingkan kinerja keuangan ketiga pemerintah daerah tersebut telah berhasil dicapai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mencapai target PAD tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemandirian keuangannya. Kota Padang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang paling baik dibandingkan Kota Solok dan Kota Payakumbuh, meskipun pendapatan daerahnya masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, Kota Payakumbuh mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pencapaian target PAD dan mengalami peningkatan pertumbuhan PAD yang cukup tinggi



pada tahun 2024. Adapun Kota Solok memperlihatkan perkembangan yang relatif konsisten, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah sehingga tingkat kemandirian keuangannya belum optimal.

Temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tercapainya target penerimaan daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menggali dan mengembangkan potensi PAD secara berkesinambungan. Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, hasil analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, serta mampu mendukung peningkatan kemandirian keuangan pada periode-periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. P. R., Werastuti¹, D. N. S., & Diatmika, I. P. G. (2026). Analisis Rasio Pertumbuhan, Kesenjangan, Dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 17, 16–23.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Irnowati, Saripuddin, & Abidin, Z. (2023). *admin*, +1. +3009-IRNAWATI, +SARIPUDDIN, +ZAINAL+ABIDIN+(FIX)+403-416. 4, 403–416.
- Pemerintah, K., & Kepulauan, D. (2019). *Inovbiz*. 7, 147–153.
- Suteja, I. G. N. (2018). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/rapi.270>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>